



**WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 66 /KPTS/BKPSDM/2022

TENTANG

**PERSYARATAN PEMBERKASAN PENETAPAN NOMOR INDUK
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP II
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU FORMASI TAHUN 2021**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : 782/B-MP.01.01/SD/D/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Usul Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 secara elektronik dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : 1766/B-MP.01.01/SD/DII/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Ralat Pengisian DRH dan Kelengkapan dokumen Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 secara elektronik, dengan ini disampaikan sebagai berikut;

1. Peserta yang dinyatakan LULUS pada Pengumuman Wali kota Lubuklinggau Nomor : 810/59/KPTS/BKPSDM/2022 tentang Kelulusan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kota Lubuklinggau Formasi Tahun 2021 wajib melakukan pemberkasan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
2. Apabila peserta seleksi dimaksud pada angka 1 (satu) tidak melakukan pemberkasan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), maka peserta seleksi dinyatakan GUGUR/MENGUNDURKAN DIRI dan yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri serta diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
3. Peserta yang LULUS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diharapkan untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id> dari tanggal 19 Januari s.d 04 Februari 2022;
4. Dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus **diunggah** oleh pelamar yang dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. Pas photo TERBARU dengan menggunakan pakaian formal berlatar belakang merah. Pakaian formal : kemeja putih berkerah. Khusus untuk wanita berkerudung menggunakan kerudung berwarna hitam).
 - b. Ijasah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;

- d. Surat Pernyataan 5 (lima) point yang di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK, atau anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan *masih berlaku ketika pemberkasan dilakukan* ;
 - f. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat berwenang pada badan/lembaga yang diberi kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Tahun 2021 yang **dikirimkan** oleh pelamar yang dinyatakan LULUS, sesuai pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020, sebagai berikut;
- a. Surat lamaran ditulis tangan menggunakan huruf kapital ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. Fotokopi Ijasah/STTB yang telah di legalisir oleh pejabat berwenang sesuai kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani dan bermaterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan *masih berlaku ketika pemberkasan dilakukan* ;
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, yang masih berlaku dengan tanggal tercantum setelah pengumuman ini dikeluarkan;

- f. Surat Keterangan yang masih berlaku dengan tanggal tercantum setelah pengumuman ini dikeluarkan bahwa tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, ditandatangani oleh dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan wewenang.
6. Pelamar diminta untuk tetap mengirimkan berkas fisik disertai dokumen pendukung Usul Penetapan NI PPPK Tahap II Tahun 2021 pada angka 5 (lima) ke Kantor BKPSDM Kota Lubuklinggau via Pos atau jasa pengiriman lainnya paling lambat diterima tanggal **6 Februari 2022**.
7. Pada saat pemberkasan tidak dipungut biaya apapun.
8. Untuk nomor *Whatsapp* Layanan dapat diakses melalui website BKPSDM Kota Lubuklinggau di menu *livechat*.
9. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

Lubuklinggau, 24 Januari 2022



CONTOH SURAT LAMARAN

LUBUKLINGGAU, JANUARI 2022

PERIHAL : **SURAT LAMARAN**

KEPADA
YTH. **BAPAK WALI KOTA LUBUKLINGGAU**
DI –
LUBUKLINGGAU

DENGAN HORMAT,

SEHUBUNGAN PENGUMUMAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR :
66/KPTS/BKPSDM/2022 TANGGAL 24 JANUARI 2022 TENTANG PERSYARATAN
PEMBERKASAN PENETAPAN NOMOR INDUK CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TAHAP II PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021, UNTUK ITU
SAYA :

NAMA :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
KUALIFIKASI PENDIDIKAN :
JABATAN YANG DILAMAR :
ALAMAT :
NO. HP :

MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, DENGAN
INI SAYA LAMPIRKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PASFOTO 4 X 6 BERLATAR BELAKANG WARNA MERAH SEBAYAK 3 (TIGA) LEMBAR;
2. FOTOKOPI IJAZAH/STTB YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN TUGAS YANG DITETAPKAN;
3. ASLI HASIL *PRINT OUT* DAFTAR RIWAYAT HIDUP YANG TELAH DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI 10.000, YANG FORMULIRNYA TELAH TERCETAK PASFOTO ;
4. ASLI SKCK YANG DITERBITKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH BERLAKU;
5. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DARI DOKTER YANG BERSTATUS PNS ATAU DOKTER YANG BEKERJA PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH, YANG MASIH BERLAKU;
6. ASLI SURAT KETERANGAN TIDAK MENGKONSUMSI/MENGGUNAKAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA YANG DITANDATANGANI OLEH DOKTER DARI UNIT PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH ATAU PEJABAT YANG BERWENANG DARI BADAN/LEMBAGA YANG DIBERIKAN KEWENANGAN;
7. ASLI SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN YANG TELAH DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI 10.000,-

DEMIKIAN PERMOHONAN SAYA, ATAS PERHATIAN DAN PERKENAN BAPAK
DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA PEMOHON,

Meterai

10.000

.....

Ket : SURAT LAMARAN DITULIS TANGAN DENGAN HURUF KAPITAL MENGGUNAKAN TINTA BEWARNA HITAM

CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUINGGUHNYA, BAHWA SAYA :

1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PNS ATAU PNS, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA ATAU PEGAWAI LAINNYA ANTARA LAIN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH;
3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUINGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH, APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

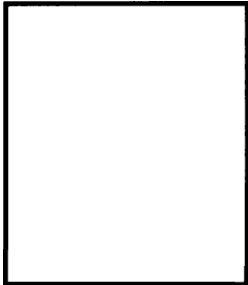
.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
10.000

.....

Ket : SURAT PERNYATAAN DITULIS TANGAN DENGAN HURUF KAPITAL MENGGUNAKAN TINTA BEWARNA HITAM

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETAUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERANGKAIAN KERJA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nomor Induk Kependudukan (NIK) _____	
2.	Nama _____	
3.	Kabupaten / Kota Tempat Lahir**)	
4.	Tanggal Lahir _____	
5.	Jenis Kelamin _____	
6.	Agama/Aliran Kepercayaan**)	
7.	Status Perkawinan _____	
8.	Emnial _____	
9.	Nomor Telepon/ Handphone _____	
10.	Alamat	a. Jalan _____
		b. Kelurahan / Desa _____
		c. Kecamatan _____
		d. Kabupaten / Kota _____
		e. Provinsi _____
11.	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm) _____
		b. Berat Badan (kg) _____
		c. Rambut _____
		d. Bentuk Muka _____
		e. Warna Kulit _____
		f. Ciri Khas _____
		g. Cacat Tubuh _____
12.	Kegemaran (Hobby) _____	

*) Ditulis dengan huruf Capital/ balok dan tinta hitam

4. Saudara Kandung

No	NI K	NI P* ^(*)	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Perkawinan	Status <u>Hidup</u>

5. Bapak/ Ibn Mertua

No	NI K	NI P ^(*)	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan / Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Perkawinan	Statu s <u>Hidup</u>

VI. KETERANGAN ORGANISASI

No	NAMA ORGANI SASI	JABATAN ORGANISASI	Masa Kerja		Tempat	PEMI MPI N ORGANISASI
			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai		

VII. KETERANGAN LAI N- LAIN

NO	NAMA KETERANGAN	SURAT KETERANGAN		
		NOMOR	TANGGAL	PEJABAT
1.	QS URAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN			
2.	SURAT KETERANGAN SEHAT			
3.	SURAT KETERANGAN BEBAS NAPZA			
4.	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah.

Yang membuat

(.....)

PERHATIAN :

1. Pada bagian *) harus ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan huruf Capital/balok dan tinta hitam.
2. Pada bagian **) coret yang tidak perlu.
3. Pada bagian ***) diisi hanya jika berstatus CPNS/ PNS/Pensiunan PNS/ PPPK.